

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB II <u>G</u> AMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	15
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	15
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	58
BAB III <u>P</u> ERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	64
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	64
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .	71
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra	74
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	79
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	80
BAB IV <u>T</u> UJUAN DAN SASARAN.....	82
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	82
BAB V <u>S</u> TRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	85
BAB VI <u>R</u> ENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	88
6.1 Tujuan dan Sasaran PD.....	88
6.2 Tujuan Strategis PD	89
6.3 Sasaran Strategi PD	89
6.4 Program dan Kegiatan	90
BAB VII <u>K</u> INERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	107
BAB VIII <u>P</u> ENUTUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra PD

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dimana dalam pasal 1 (Ketentuan Umum) menyatakan bahwa, Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Seiring mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota, sehingga penyebutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi (PD), dan Rencana Strategis SKPD berubah menjadi Rencana Strategis PD.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil, evaluasi pelaksanaan Renstra tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Dari hasil pengkajian dan evaluasi tersebut bisa dihindari kegagalan dalam pelaksanaan Rencana Strategis PD, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sebagai dokumen perencanaan PD periode 5 (lima) tahun, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan visi dan misi Walikota Surabaya yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, yaitu misi kedua “Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar

lainnya”, sehingga memiliki kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada keluarga serta pemberdayaan ekonomi keluarga, melaksanakan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera agar terwujud keluarga berkualitas, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program. Untuk mewujudkan misi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menyusun Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra PD

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan Kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
- b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD) dan pagu indikatif (untuk penyusunan RKPD dan Renja PD).

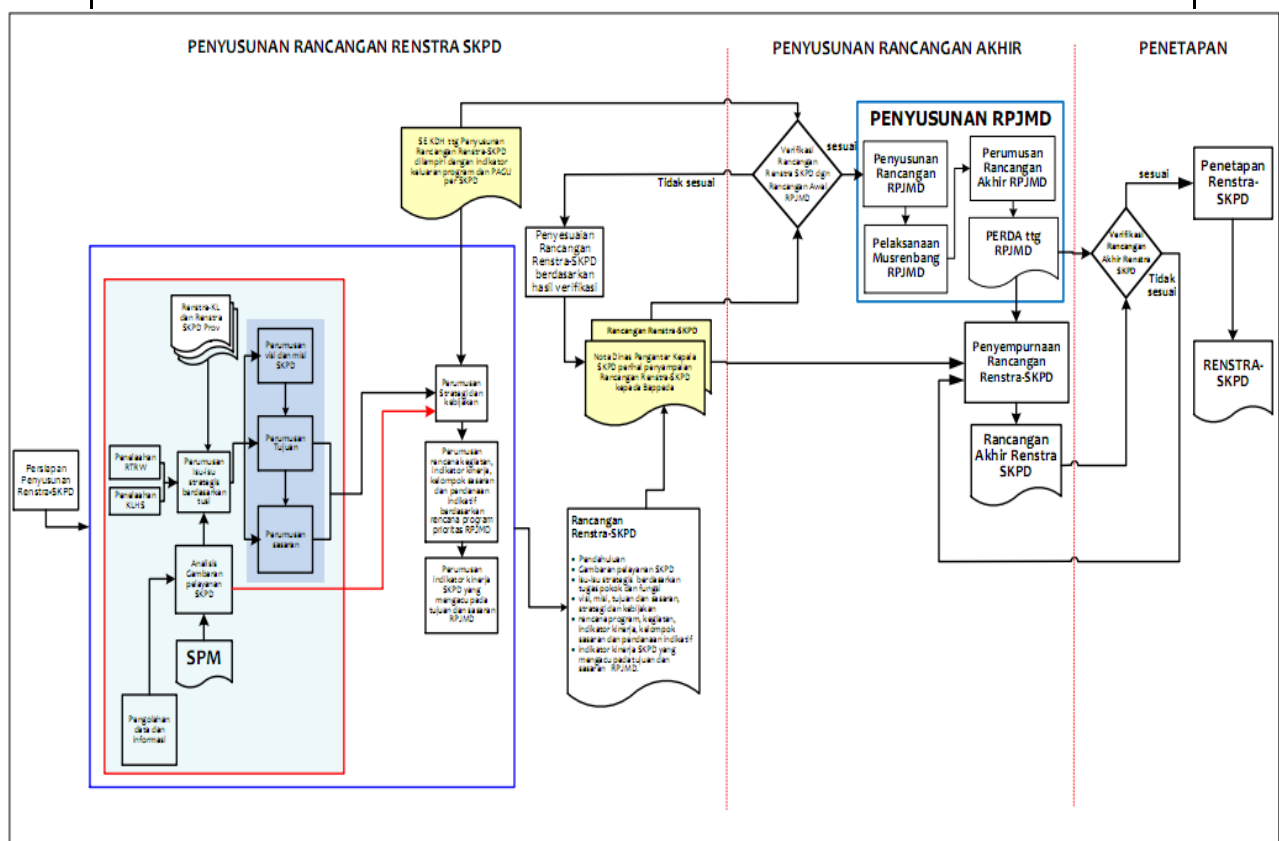
Pendekatan kinerja yang dimaksud adalah program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur dan pengalokasian anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan kerangka pengeluaran jangka menengah yaitu pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu yaitu pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah, PD menyusun Renstra PD.

Tahapan penyusunan Renstra PD adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan rancangan Renstra
- b. Perumusan strategi dan kebijakan
- c. Perumusan Rencana Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

- d. Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- e. Pengolahan data dan informasi untuk merumuskan isu strategis PD
- f. Perumusan rancangan Renstra PD mulai visi kegiatan indikatif yang telah memperhatikan rancangan RPJMD
- g. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra PD
- h. Verifikasi dan penyempurnaan Rancangan Renstra PD mengacu pada Rankhir RPJMD.
- i. Penetapan Renstra PD

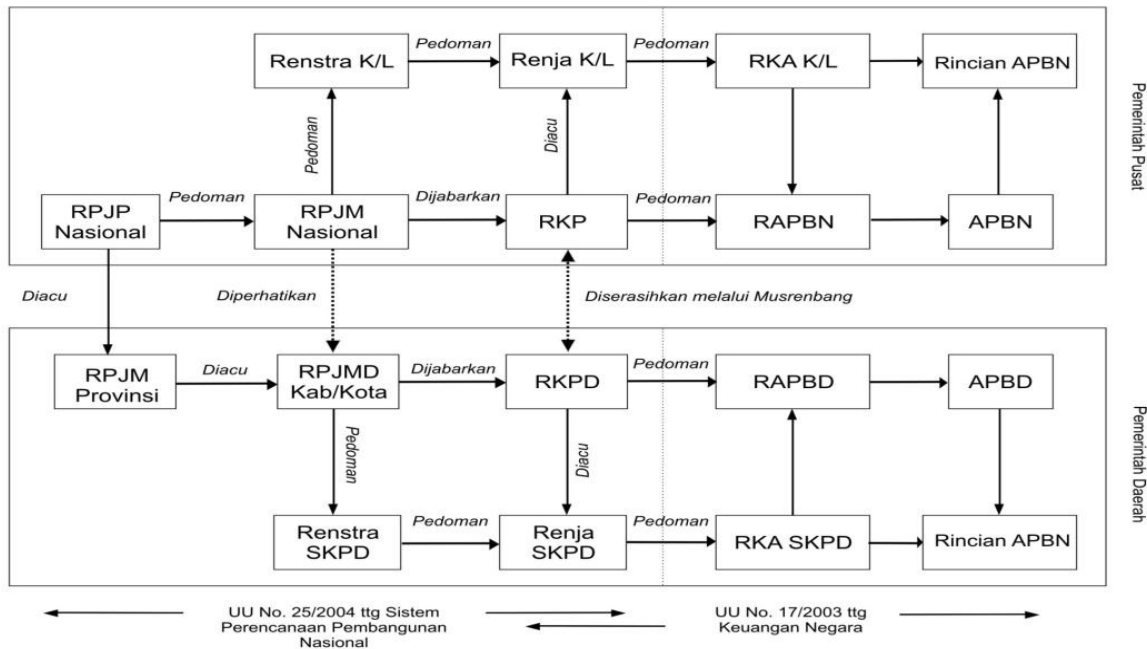
Proses Penyusunan Renstra PD Gambar1. 1



Dokumen Renstra PD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun gambaran tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dengan dokumen perencanaan

lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 Keterkaitan antar dokumen perencanaan penganggaran



1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap pentingnya Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak sebagai upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga masyarakat Kota Surabaya, dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara lebih transparan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menyusun rencana strategis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan.

- Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra SKPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5234) sebagaimana telah berberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI tahun 2015 nomor 58 tambahan LNRI nomor 5679).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6222);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
 19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Lembaga Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) ;
 20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 – 2025 ;
 21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2034 .
 22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
 23. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
 24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.
 25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;

26. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/275/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

1.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018, target dan indikator penerima layanan Standart Pelayanan Minimal tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, TRANTIBUMLINMAS, dan Sosial. Namun, pada penjabaran indikator tidak terdapat SPM yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

1.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Pemerintahan Daerah memuat tentang capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Teknis dan pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian.

Sesuai Tugas dan Fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya memiliki indikator sebagai berikut:

1. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kabupaten/Kota.
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).
3. TFR (Angka Kelahiran Total).
4. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR).
5. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need).

1.2.5. Ketentuan Indikator Sustainability Development Goals (SDGs)

Program Millennium Development Goals (MDG's) telah berakhir tahun 2015 dan dilanjutkan dengan Program Sustainability Development Goals (SDGs) yang merupakan arah pembangunan nasional. Beberapa indikator SDGs yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

1. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, mengurangi eksposur dan kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem yang terkait dengan iklim, guncangan ekonomi, sosial dan lingkungan lainnya maupun bencana.
2. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional
3. Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan
4. Akhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan.
5. Hilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta jenis-jenis eksploitasi lainnya.

6. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan maupun perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.
7. Meningkatkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, serta mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk akses ke layanan keuangan.
8. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

1.2.6. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/ Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Pada Tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit Pemerintah dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, dan Rencana Strategis PD.

Dalam ketentuan Peraturan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Kota Surabaya memiliki 3 indikator dan target yang harus dipenuhi pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Indikator jumlah lembaga yang mengikuti penguatan dan pengembangan jaringan Pengarusutamaan Gender dengan target 289 lembaga.
2. Indikator jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan dengan target 29 kali.
3. Indikator Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk dengan target 1 dokumen.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra PD adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis PD selama 5 tahun (jangka pendek).
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan PD, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja 5 tahun lalu menjadi rencana strategis PD 5 tahun kedepan.

Tujuan Penyusunan Renstra PD adalah :

1. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan PD dalam jangka 5 Tahun;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran PD;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

	2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
	3.3.	Telaah Renstra K/L dan Renstra
	3.4.	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII		PENUTUPAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas dibantu oleh 1 Sekretariat dan 3 Bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan meliputi merencanakan, menyusun, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perencanaan program dan anggaran, perundang-undangan, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan sarana prasarana dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- k. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- l. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- n. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- o. Pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja perangkat daerah;
- p. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di sekretariat;

- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2. Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi maupun kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan sinkronisasi program dan kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak;
- f. Pelaksanaan pemetaan di bidang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- g. Pelaksanaan penyusunan pedoman teknis dan program pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;
- h. Pelaksanaan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak;

- i. Pelaksanaan fasilitasi jejaring pengarusutamaan gender;
- j. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas hidup anak;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan perempuan;
- l. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan jaringan pemenuhan hak anak;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;

- e. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
- f. Pelaksanaan sinkronisasi program dan kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak;
- g. Pelaksanaan upaya perlindungan perempuan dan anak;
- h. Pelaksanaan penguatan jejaring perlindungan perempuan dan anak;
- i. Pelaksanaan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak;
- j. Pelaksanaan penjangkauan permasalahan perlindungan perempuan dan anak;
- k. Pelaksanaan pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban permasalahan;
- l. Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan perempuan dan anak termasuk rumah aman bagi anak korban kekerasan maupun anak berhadapan dengan hukum;
- m. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. Pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- d. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/ rekomendasi sesuai bidangnya;
- e. Pelaksanaan sinkronisasi program, kebijakan, pembinaan dan bimbingan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. Pelaksanaan pengembangan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan kader Keluarga Berencana;
- h. Pelaksanaan peningkatan partisipasi dalam program Keluarga Berencana;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pelayanan keluarga berencana;
- j. Melaksanakan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-Keluarga Berencana;
- k. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana;
- l. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- m. Pelaksanaan pemetaan parameter pengendalian penduduk;
- n. Pelaksanaan penyusunan Profil Kependudukan dan kajian dampak kependudukan;
- o. Pelaksanaan penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
- p. Pelaksanaan pengukuran dan perhitungan indikator kerentanan dampak kependudukan;
- q. Pelaksanaan analisis, monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan pelaksanaan tugas keluarga sejahtera;
- r. Pelaksanaan penyediaan bahan, sarana, prasarana dan fasilitasi pemberdayaan keluarga akseptor;
- s. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kinerja

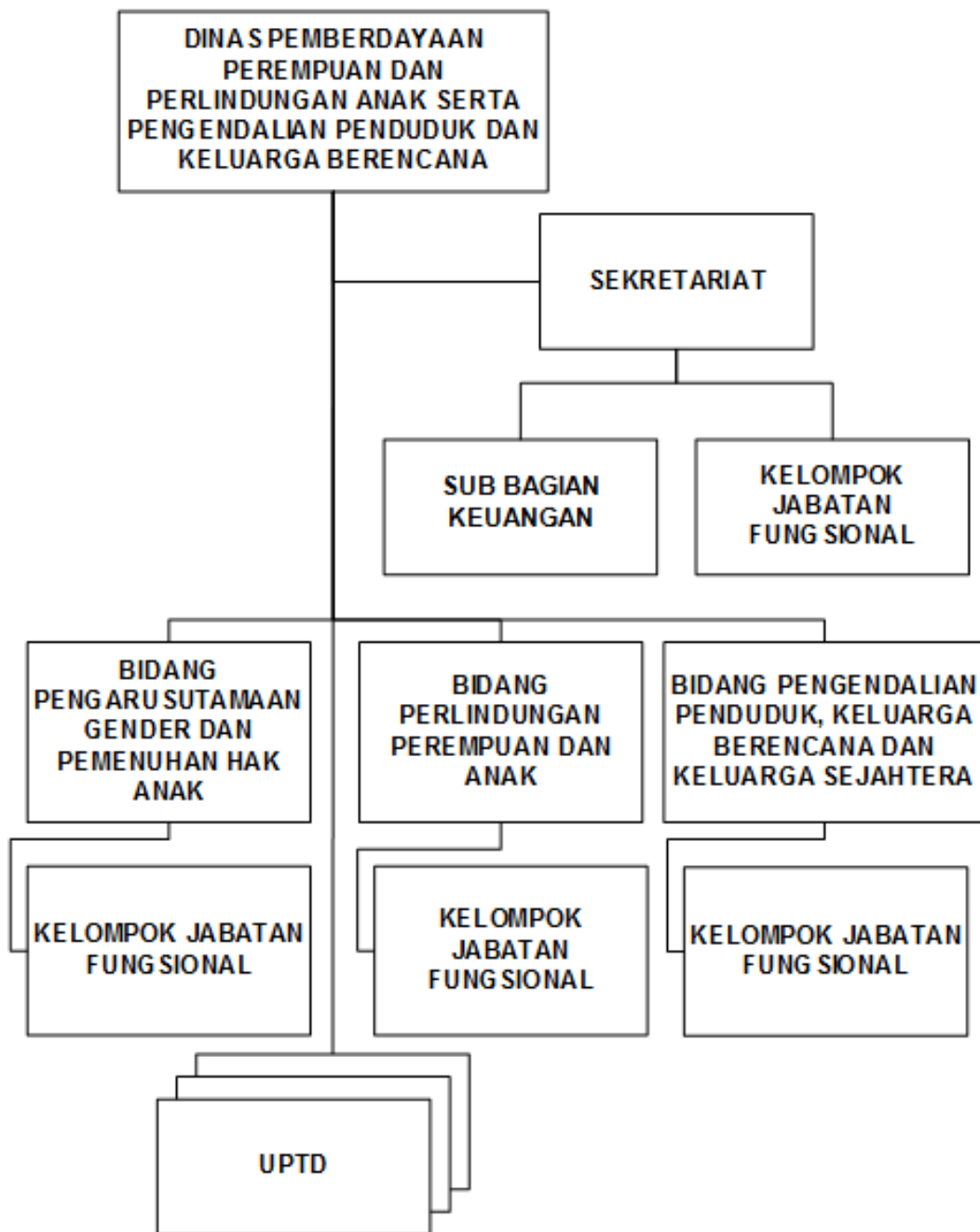
- yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- u. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURABAYA



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Data Pegawai :

Tabel 2.1.
Data Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya

No	Pegawai	Jumlah	Keterangan
1.	Berdasarkan Status Pegawai :		L : 10 / P : 28
	- PNS	37	
	- CPNS	1	
2.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan :		
	- SD	1	
	- SLTP	0	
	- SLTA	10	
	- D-4	0	
	- D-3	1	
	- S-1	17	
	- S-2	9	
3.	Berdasarkan Golongan :		
	- I/c	1	
	- II/b	0	
	- II/c	4	
	- II/d	6	
	- III/a	1	
	- III/b	4	
	- III/c	5	
	- III/d	13	
	- IV/a	3	
	- IV/b	0	
	- IV/c	0	

B. Data Aset Perangkat Daerah :

Tabel 2.2.
Data Aset di Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya

No	Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan/Gedung Kantor	10	Bangunan : - Bangunan Shelter Perempuan /
2.	Tanah	6	

No	Aset	Jumlah	Keterangan
			Rumah aman korban kekerasan pada anak perempuan
3.	Kendaraan Dinas :		- Gedung Shelter ABH / Rumah Tinggal Laki-laki
	Mobil Operasional	4	- Bangunan untuk Rumah produksi konveksi/ Fashion, Kerajinan/ Handycraft-souvenir & Sablon (Eks. Lokalisasi)
	Mobil Pelayanan	5	- Bangunan untuk Rumah produksi konveksi/ Fashion, Kerajinan/ Handycraft-souvenir & Sablon (Eks. Wisma Bogel)
	Sepeda Motor	48	- Bangunan untuk Rumah produksi konveksi/ Fashion, Kerajinan/ Handycraft-souvenir & Sablon
4.	Perlengkapan Kerja :		- Bangunan Kantor DP5A
	Komputer	54	- Bangunan Musholla DP5A
	Printer	24	- Bangunan Parkir DP5A
	AC	25	- Bangunan Sentra Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, dan Keagamaan Masyarakat
	Papan Tulis Elektrik	1	- Bangunan Gedung Pelatihan Keterampilan Masyarakat
	Mesin Ketik Elektrik	1	
	Genset	3	
	LCD	12	
	Penghancur Kertas	1	
	Mesin Fax	2	
	Televisi	7	
	Kamera Digital	12	
	Brankas	6	
	Note book	11	
	Tensimeter	6	
	Dispenser	4	
	Acces Control Pintu Finger PWS	1	
	Lemari kayu	5	
	Layar Infocus	5	
	Compresor	1	
	Tenda	1	
	Tempat tidur bayi	1	
	Thermogun	3	
	Lemari Es	3	
	Lemari (kayu, arsip, filo besi)	33	
	Lemari pakaian	15	
	BKB Kit	1	
	Blender	3	
	Coding (Mesin cetak expired date)	3	
	Continous Sealer	3	
	Cup Sealer	2	
	Digital voice recorder	2	
	DVD Player	1	
	DVR HD CUI 4 chanel	2	

No	Aset	Jumlah	Keterangan
	Filling Cabinet	21	
	Freezer	1	
	Genre Kit:		
	Laptop	30	
	LCD Proyektor	30	
	Tas Praktik Genre	30	
	Hand sealer	4	
	Handhold Metal Detector	1	
	HT	11	
	Hardisk External	11	
	Implan Kit	8	
	Induksi Sealer	3	
	CCTV	19	
	IUD Kit	3	
	Kipas Angin	11	
	Kompor Gas	1	
	Mesin penghitung uang	3	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya selama periode 2016-2021 menunjukkan realisasi dimana sebagian besar target mampu dicapai. Jika di total dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 terdapat 7 tujuan, 12 sasaran, 15 program, dan 211 kegiatan, beberapa diantaranya terdapat perubahan yang disesuaikan dengan perubahan RPJMD 2016-2021. Indikator program yang telah disesuaikan untuk diaplikasikan di tahun 2020 dan 2021 adalah:

1. Persentase efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A);
2. Persentase Kelurahan Ramah Anak;
3. Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani;
4. Persentase kelurahan yang responsif gender;
5. Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsive gender dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need);

7. Persentase peserta KB aktif;
8. Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi;
9. Persentase peserta KB baru;
10. Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia yang aktif;
11. Persentase perempuan usia produktif hasil pendampingan yang berproduksi;
12. Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran;
13. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran; dan
14. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.

Pencapaian kinerja PD sebagian besar tercapai, jika dilihat pada realisasi sampai dengan tahun 2020 yang sudah terlaksana. Mengacu pada indikator dan target kinerja berdasarkan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yang saat ini telah berjalan hingga tahun kelima dan sebagian besar target kinerja PD telah tercapai, maka terdapat pembaruan target yang disesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PD demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel T-C.23.

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Surabaya

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Targ et IKK	Target Indika tor Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Tujuan : Meningkatkan pemberdayaan perempuan	Persentase kecamatan yang responsif gender	N/A	✓	N/A	48.39%	61.29%	74.19%	N/A	N/A	48.39%	61.29%	74.19%	N/A	N/A	99.99%	100%	100%	N/A	N/A
Sasaran : Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase Kecamatan yang belum Responsif Gender	N/A	N/A	N/A	51.61%	38.71%	25.81%	N/A	N/A	51.61%	38.71%	29.03%	N/A	N/A	100%	100%	112.48%	N/A	N/A
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	N/A	N/A	N/A	72 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	72 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	N/A	N/A	N/A	33 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	33 Lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Peningkatan Peran serta Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)	N/A	N/A	N/A	5 Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5 Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyusunan Data Terpilah Gender dalam Pembangunan	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyusunan Profil Gender	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Organisasi Perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	34 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	94.12%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	N/A	N/A	N/A	N/A	13 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	147 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	291 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	197.96 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Kegiatan : Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Kegiatan : Peningkatan pemahaman pengarusutamaan gender kepada masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	886 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	88.60%	N/A	N/A
Tujuan : Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		N/A	✓	N/A	35.71%	51.95%	68.18%	N/A	N/A	32.47%	52.6%	68.18%	N/A	N/A	90.92%	101.25 %	100%	N/A	N/A	

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Sasaran : Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase tindak lanjut permasalahan perempuan dan anak	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100.00 %	N/A	N/A	100 %	100%	100%	N/A	N/A
Program perlindungan perempuan dan anak	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	N/A	N/A	N/A	65.21%	66.35%	66.86%	N/A	N/A	83.00 %	72.7%	75.43%	N/A	N/A	127.28%	109.57 %	112.81 %	N/A	N/A
	Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	N/A	N/A	N/A	10%	21%	35%	N/A	N/A	53.51 %	100%	82.16%	N/A	N/A	535.14%	476.19 %	234.75 %	N/A	N/A
	Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100 %	100%	100%	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	N/A	N/A	N/A	319 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	333 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	104.39%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	N/A	N/A	N/A	421 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	420 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	99.76%	N/A	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Fasilitasi pengembangan Jaringan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	N/A	N/A	N/A	926 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	926 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Inisiasi Kampung Arek Suroboyo	N/A	N/A	N/A	154 Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	154 Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	230 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	489 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	212.61 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak, PPTP2A	N/A	N/A	N/A	N/A	926 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1818 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	196.33 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Inisiasi Kampung Arek Suroboyo	N/A	N/A	N/A	N/A	154 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	154 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	431 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	431 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	330 kasus	N/A	N/A	N/A	N/A	482 kasus	N/A	N/A	N/A	N/A	146.06 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	431 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	431 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	926 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	976 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	105.40 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	154 kampung	N/A	N/A	N/A	N/A	154 kampung	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional Shelter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Tujuan : Memberdayakan PMKS usia produktif untuk mandiri		N/A	✓	N/A	80%	80%	80%	N/A	N/A	73.09%	59.7%	73.68%	N/A	N/A	91.37%	74.62%	92.11%	N/A	N/A	
Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		N/A	N/A	N/A	10%	10%	10%	N/A	N/A	10.00%	72.2%	43.27%	N/A	N/A	100%	721.98%	432.73%	N/A	N/A	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat		N/A	N/A	N/A	75%	75%	75%	N/A	N/A	48.85%	100%	69.09%	N/A	N/A	65.14%	133.33%	92.12%	N/A	N/A	
	Kegiatan : Dinamisasi Data Keluarga Berpendapatan Rendah	N/A	N/A	N/A	154 kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	154 kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Kegiatan : Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri	N/A	N/A	N/A	750 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	544 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	72.53%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	N/A	N/A	N/A	63 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	72 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	114.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Updating data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	154 kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	154 kelurahan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Inkubasi Usaha Mandiri	N/A	N/A	N/A	N/A	327 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	327 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	N/A	N/A	N/A	N/A	63 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	141.27 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Program Kesejahteraan Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	866 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	871 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100.58 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi dan Pendampingan Inkubasi Usaha Mandiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	275 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	275 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	63 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	63 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Evaluasi Inkubasi Usaha Mandiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Tujuan : Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	✓	N/A	62%	64%	66%	N/A	N/A	73.86%	85.12%	85.93%	N/A	N/A	119.13%	133%	130.20%	N/A	N/A	
	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	N/A	✓	N/A	90.84%	91.53%	91.96%	N/A	N/A	88.89%	100%	100%	N/A	N/A	97.85%	109.25%	108.74%	N/A	N/A	
	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	N/A	✓	N/A	76%	77%	78%	N/A	N/A	79.40%	86.35%	86.46%	N/A	N/A	104.47%	112.14%	110.85%	N/A	N/A	
Sasaran : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan program	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operasional plan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis	N/A	N/A	N/A	9 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12 Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Sasaran : Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	93.73%	93.87%	99.59%	N/A	N/A	93.73%	93.87%	99.59%	N/A	N/A	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	72%	74%	76%	N/A	N/A	77.06%	86.9%	86.46%	N/A	N/A	107.03%	117.43%	113.76%	N/A	N/A	
	Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	56 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	56 jenis	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	130.09 %	N/A	N/A	N/A	N/A	130.09 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	87.45 %	87.73%	99.18%	N/A	N/A	87.45 %	87.73%	99.18%	N/A	N/A	
	Kegiatan : Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	N/A	N/A	N/A	107 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	110 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	102.80%	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	214 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	220 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	102.80 %	N/A	N/A	N/A	
	Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	
	Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan KB dasar	N/A	✓	N/A	1.8-1.9	1.8-1.9	1.8-1.9	N/A	N/A	1.78-1.9	1.73-1.9	1.73-1.9	N/A	N/A	101.17%	103.83 %	103.94 %	N/A	N/A	

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB kontrasepsi Mantap	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	95.86%	87.63%	100%	N/A	N/A	95.86%	87.63%	100%	N/A	N/A
Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	N/A	N/A	N/A	20.85%	20.5%	20.2%	N/A	N/A	18.24%	19.78%	19.11%	N/A	N/A	112.50%	103.51%	105.4%	N/A	N/A
	Persentase peserta KB aktif	N/A	N/A	N/A	77.31%	78.40%	79.60%	N/A	N/A	80.96%	80.28%	80.94%	N/A	N/A	104.72%	102.4%	101.69%	N/A	N/A
	Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	N/A	N/A	N/A	5.8%	5.4%	5.25%	N/A	N/A	2.37%	3.2%	0.30%	N/A	N/A	159.15%	140.78%	194.32%	N/A	N/A
	Persentase peserta KB baru	N/A	N/A	N/A	81.15%	81.95%	82.75%	N/A	N/A	48.93%	97.9%	96.28%	N/A	N/A	60.29%	119.46%	116.35%	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	2033 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	2016 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	99.16%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi pergerakan program kependudukan dan keluarga berencana	N/A	N/A	N/A	310 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	310 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	4000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	4000 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	N/A	N/A	N/A	600 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	625 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	104.17%	N/A	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	3 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Peduli Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	2033 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2033 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi penggerakan program kependudukan dan keluarga berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	1850 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1856 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100.32 %	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	4310 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3034 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	70.39%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	857 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	839 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	97.90%	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Saka Kencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	1 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1740 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	1642 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	94.37%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1718 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	915 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	53.26%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	775 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	775 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	N/A	N/A
	Kegiatan : Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	103.23 %	N/A	N/A
	Kegiatan : Penyusunan Profil Pengendalian Penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Program Bina Keluarga	N/A	N/A	N/A	47.9%	70.39%	92.89%	N/A	N/A	100%	100%	100%	N/A	N/A	208.77%	142.07 %	107.65 %	N/A	N/A	
	Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	N/A	N/A	N/A	3.4%	3.3%	3.2%	N/A	N/A	0.05 %	0.07%	0.01%	N/A	N/A	198.62%	198.03 %	199.83 %	N/A	N/A	

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Fasilitasi pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	N/A	N/A	N/A	1350 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1313 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	97.26%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Keluarga Sejahtera	N/A	N/A	N/A	1240 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1144 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	92.26%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pendampingan Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	N/A	N/A	N/A	N/A	1350 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1329 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	98.44%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Keluarga Sejahtera	N/A	N/A	N/A	N/A	1280 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1371 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	107.11%	N/A	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan terhadap Pendamping Bina Keluarga Balita/Bina Keluarga Remaja/Bina Keluarga Lansia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1350 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1333 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	98.74%	N/A	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Keluarga Sejahtera	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1280 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1465 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	114.45%	N/A	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif		N/A	✓	N/A	0.25%	0.25%	0.25%	N/A	N/A	0.25%	1.25%	1.00%	N/A	N/A	100%	500%	400%	N/A	N/A	
Sasaran : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		N/A	N/A	N/A	25%	25%	25%	N/A	N/A	25.00%	99.36%	28.00%	N/A	N/A	100%	397.45%	112%	N/A	N/A	
Program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif		N/A	N/A	N/A	5%	6%	7%	N/A	N/A	12.79%	7.84%	7.20%	N/A	N/A	255.81%	130.72%	102.86%	N/A	N/A	
		N/A	N/A	N/A	43.75%	62.5%	81.25%	N/A	N/A	62.50%	87.5%	87.50%	N/A	N/A	142.86%	140%	107.69%	N/A	N/A	
Kegiatan : Pembinaan Rumah Kreatif Kandungan		N/A	N/A	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	1 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	
Kegiatan : Pengelolaan Rumah Kreatif		N/A	N/A	N/A	N/A	1 bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	1 bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Pengelolaan Rumah Kreatif Handycraft	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
	Kegiatan : Pelatihan Handycraft di Rumah Kreatif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	192%	N/A	N/A
Tujuan : Meningkatkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak		N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	93,69	93,7	N/A	N/A	N/A	93.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.01	N/A
		N/A	N/A	N/A																
Sasaran : Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
Program Perlindungan Perempuan dan Anak		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	73,84%	74,98%	N/A	N/A	N/A	84%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	113.76 %	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84,42%	100%	N/A	N/A	N/A	77.27 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91.53%	N/A
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Kegiatan : Capacity Building bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah orang yang mengikuti Capacity Building	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	926 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	942 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	101.73 %	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Pencapaian Indikator Kota Layak Anak	jumlah lembaga yang difasilitasi dalam pencapaian indikator kota layak anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	431 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	279 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Kegiatan : Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo	Jumlah kampung Kampunge Arek Suroboyo yang dibina dan dikembangkan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	154 kampung	154 kampung	N/A	N/A	N/A	154 kampung	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Kegiatan : Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan Dan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200 kasus	200 kasus	N/A	N/A	N/A	233 kasus	N/A	N/A	N/A	N/A	116.50 %	N/A
	Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional Shelter	jumlah shelter yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Sasaran : Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan	Persentase kecamatan yang belum resposif gender	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.90%	0.00%	N/A	N/A	N/A	6.45%	N/A	N/A	N/A	N/A	149.99 %	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelurahan yang responsif gender	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20,13%	41,56%	N/A	N/A	N/A	20.13 %	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
		Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00 %	100,00 %	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Kegiatan : Fasilitasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	16 kali	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	Jumlah lembaga yang mengikuti Penguatan dan Pengembangan Jaringan Pengarusutamaan Gender	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	289 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	72 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Kegiatan : Penyusunan Profil Gender dan Evaluasi Atas Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya	Jumlah dokumen yang disusun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	2 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan KB	Persentase terlaksananya pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	108.11%	N/A	N/A	N/A	N/A	108.11%	N/A
	Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19,47%	19,22%	N/A	N/A	N/A	17.63%	N/A	N/A	N/A	N/A	109.45%	N/A
		Persentase peserta KB aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80,89%	80,95%	N/A	N/A	N/A	82.37%	N/A	N/A	N/A	N/A	101.83%	N/A
		Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,99%	2,78%	N/A	N/A	N/A	0.16%	N/A	N/A	N/A	N/A	194.53%	N/A
		Persentase peserta KB baru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	53,25%	97,94%	N/A	N/A	N/A	50.76%	N/A	N/A	N/A	N/A	95.32%	N/A
		Kegiatan : Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	Jumlah lembaga yang mendapat Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	31 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
		Kegiatan : Fasilitasi Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah orang Yang Mengikuti Penggerakan Program Kependudukan dan Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2028 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	1566 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian						
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	Kegiatan : Penyediaan Pelayanan KB Bagi Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	650 orang	650 orang	N/A	N/A	N/A	149 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51.38%	N/A
	Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang disediakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80 Paket	52 unit	N/A	N/A	N/A	64 Paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	103.23 %	N/A
	Kegiatan : Pengadaan Sarana Penurunan Stunting (DAK) Bidang Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4 unit	38 Unit	N/A	N/A	N/A	4 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Sasaran : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	25%	N/A	N/A	N/A	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian						
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Operasional PUSPAGA	Jumlah Puspaga yang diselenggarakan operasionalnya selama 12 bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 lembaga	2 lembaga	N/A	N/A	N/A	2 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
Tujuan : Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	>70-80	>80-90	N/A	N/A	N/A	76.94	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A
Sasaran : Terjaganya kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan		Kinerja pengelolaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	99.75 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	99.75%	N/A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	87,00%	88,00%	N/A	N/A	N/A	88.22 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	101.4%	N/A
Kegiatan : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan		Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

Level	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi					Capaian					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	99.5%	N/A	N/A	N/A	N/A	99.5%	N/A
	Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A

Melalui tabel T-C.23. dapat diketahui capaian indikator program tahun 2020 adalah sebagai berikut.

- 1) Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A) memiliki capaian sebesar 113,76%.
- 2) Persentase Kelurahan Ramah Anak memiliki capaian sebesar 91, 53%.
- 3) Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani memiliki capaian sebesar 100%.
- 4) Persentase kelurahan yang responsif gender memiliki capaian sebesar 100%.
- 5) Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan memiliki capaian sebesar 100%.
- 6) Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) memiliki capaian sebesar 109,45%.
- 7) Persentase peserta KB aktif memiliki capaian sebesar 101,83%.
- 8) Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi memiliki capaian sebesar 194,53%.
- 9) Persentase peserta KB baru memiliki capaian sebesar 95,32%.
- 10) Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia yang aktif memiliki capaian sebesar 100%.
- 11) Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi memiliki capaian sebesar 110,52%.
- 12) Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran memiliki capaian sebesar 101,4%.
- 13) Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran memiliki capaian sebesar 100%.
- 14) Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik memiliki capaian sebesar 99,5%.

Jika dilihat secara keseluruhan, indikator kinerja program perangkat daerah khususnya merujuk pada pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki capaian yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator kinerja yang memiliki rasio capaian 90% keatas jauh lebih banyak dari pada indikator kinerja yang memiliki rasio capaian rendah.

Selain capaian perangkat daerah berdasarkan realisasi target output, berikut dukungan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya pada PD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, sesuai dengan Tabel T-C.24.

Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Surabaya

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif	546,606,426	510,919,120	526,915,000	N/A	N/A	381,130,697	438,774,010	456,765,389	N/A	N/A	69.73%	85.88%	86.69%	N/A	N/A	-1.80%	9.92%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	259,533,224	207,565,555	0	N/A	N/A	154,334,849	182,070,457	0	N/A	N/A	59.47%	87.72%	0.00%	N/A	N/A	-50.00%	50.00%
Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	2,073,448,581	2,429,061,417	2,975,711,662	N/A	N/A	1,769,591,419	1,997,591,070	2,435,076,456	N/A	N/A	85.35%	82.24%	81.83%	N/A	N/A	21.76%	18.80%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	7,556,047,907	6,336,960,650	3,446,030,722	N/A	N/A	6,111,856,355	5,411,826,470	3,265,824,477	N/A	N/A	80.89%	85.40%	94.77%	N/A	N/A	-27.20%	23.28%
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan	879,861,115	1,077,962,509	1,012,069,485	N/A	N/A	650,005,166	967,613,387	813,553,833	N/A	N/A	73.88%	89.76%	80.39%	N/A	N/A	7.51%	12.58%

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Prasarana kedinasan																	
Program Keluarga Berencana	5,110,116,038	8,131,813,848	9,065,732,121	N/A	N/A	4,273,181,750	5,450,968,446	7,400,585,665	N/A	N/A	83.62%	67.03%	81.63%	N/A	N/A	38.70%	36.59%
Program Bina Keluarga	1,182,909,968	2,008,974,428	1,673,381,824	N/A	N/A	988,672,796	1,903,906,694	1,580,648,889	N/A	N/A	83.58%	94.77%	94.46%	N/A	N/A	20.73%	29.94%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,013,696,424	3,355,224,719	3,794,467,180	N/A	N/A	2,759,585,090	3,173,553,726	3,539,712,983	N/A	N/A	91.57%	94.59%	93.29%	N/A	N/A	12.95%	14.13%
Program perlindungan perempuan dan anak	4,745,823,491	5,311,361,696	5,263,599,097	N/A	N/A	4,165,767,216	4,810,031,275	4,697,214,231	N/A	N/A	87.78%	90.56%	89.24%	N/A	N/A	5.46%	6.38%
Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	N/A	N/A	N/A	1,337,502,389	N/A	N/A	N/A	N/A	1,131,603,482	N/A	N/A	N/A	N/A	84.61%	N/A	-	-
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	N/A	N/A	N/A	3,466,324,344	N/A	N/A	N/A	N/A	3,175,518,973	N/A	N/A	N/A	N/A	91.61%	N/A	-	-

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Keluarga Berencana	N/A	N/A	N/A	7,607,698,641	N/A	N/A	N/A	N/A	3,836,442,247	N/A	N/A	N/A	N/A	50.43%	N/A	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	N/A	N/A	4,113,039,032	N/A	N/A	N/A	N/A	3,697,346,648	N/A	N/A	N/A	N/A	89.89%	N/A	-	-
Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	N/A	N/A	N/A	2,771,143,185	N/A	N/A	N/A	N/A	2,677,346,946	N/A	N/A	N/A	N/A	96.62%	N/A	-	-
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	N/A	N/A	N/A	604,665,100	N/A	N/A	N/A	N/A	437,646,719	N/A	N/A	N/A	N/A	72.38%	N/A	-	-
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	N/A	N/A	N/A	N/A	4,147,602,903	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Perekonomian Dan Pembangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	3,594,743,672	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Perlindungan Khusus Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	2,269,562,127	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	N/A	N/A	N/A	N/A	304,150,938	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Perlindungan Perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	121,943,898	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,301,426,243	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,514,160,469	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	N/A	N/A	N/A	N/A	3,218,569,225	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	12,319,885,393	N/A	N/A	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menghadapi berbagai tantangan serta berpotensi memperoleh peluang bagi pengembangan pelayanan PD. Salah satu dasar bagi perumusan tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam pelayanan PD adalah dengan mengacu pada indikator sasaran strategis dari pemerintah pusat.

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD Provinsi

Berikut data indikator sasaran strategis Kementerian PPPA Tahun 2020-2024 pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Indikator Sasaran Strategis Kementerian PPPA Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja SS.1 :						
a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,21	91,28	91,28	91,33	91,39
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,24	73,5	73,74	73,97	74,18
c. TPAK Perempuan	Persen	52,51	53,13	53,76	54,38	55
d. Indeks PUG Nasional	Indeks	64,16	67,95	71,03	74,2	76,93
Indikator Kinerja SS.2 :						
a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49
b. Proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun	Persen	10,19	9,8	9,44	9,08	8,74
c. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	Persen	247	270	290	315	335
d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	Persen	3,64	3,59	3,55	3,51	3,47
Indikator Kinerja SS.3 :						
a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat	Indeks	5	15	33	55	75
b. Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	73	73,5	74	74,5	75
Indikator Kinerja SS.4 :						
a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN)	Persen	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun

Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
b. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni)	Persen	20	40	60	80	100
c. Persentase pemda yg menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%)	Persen	20	40	60	80	100
Indikator Kinerja SS.5 :						
a. Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR 2018)	Persen	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun
b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni)	Persen	65	68	70	72	75
c. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	Persen	6	5,27	5	4,5	4
d. Persentase Pemda melaksanakan layanan sesuai standar	Persen	0	5	5	5	5
Indikator Kinerja SS.6 :						
a. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	75	80	85	90
b. Opini BPK atas Laporan Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
c. Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4
d. Nilai SAKIP	Persen	96	97	98	99	100

Sumber : Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Berikut data indikator sasaran strategis BKKBN Tahun 2020-2024 pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Indikator Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2020-2024

Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024						
Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,26	2,24	2,21	2,19	2,1
Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41

Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024						
Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASF 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	25	24	21	20	18
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 0-100)	53,57	55,00	57,00	59,00	61,00
Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1

Sumber : RENSTRA BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024

Berikut data indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 pada tabel berikut.

Tabel 2.5 Indikator Sasaran Strategis DP3AK Jawa Timur Tahun 2020-2024

Rencana Strategis DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024						
Indikator Sasaran Strategis	Satuan	Target Kinerja Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	persen	47%	50%	55%	60%	65%
Persentase perempuan pengambil keputusan	persen	15,1%	15,2%	15,3%	15,4%	15,5%
Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	persen	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penanganan Anak Korban Kekerasan	persen	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	persen	86,84%	89,47%	89,47%	94,73%	100%
Cakupan KB Aktif (CPR)	persen	75,90%	76,15%	76,40%	76,65%	76,90%
Persentase data penduduk yang akurat	persen	99,75%	99,80%	99,85%	99,90%	99,95%

Sumber : RENSTRA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Indikator kinerja pada program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagian mengacu pada indikator sasaran strategis dari Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya yang berkaitan dengan tupoksi Kemen PPPA dan BKKBN.

Pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada indikator sasaran strategis Kemen PPPA dan BKKBN yang tertuang dalam Renstra K/L tersebut. Indikator sasaran strategis Kemen PPPA yang mendukung tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanayaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Jumlah Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA, Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (SPHPN dan Simfoni), dan Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif (SNPHAR dan Simfoni). Indikator sasaran strategis BKKBN hampir secara keseluruhan mendukung tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kecuali indikator Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASF 15-19) dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP). Pada Indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 secara keseluruhan mendukung tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

2.4.2 Hasil Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 yang disusun berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Visi penataan ruang Kota Surabaya adalah terwujudnya Kota Perdagangan Dan Jasa Internasional Berkarakter Lokal yang Cerdas, Manusiawi dan Berbasis Ekologi. Misi penataan ruang Kota Surabaya adalah :

- a. Meningkatkan kualitas penataan ruang kota dan infrastruktur kota yang menjamin aksesibilitas publik berwawasan lingkungan dan nyaman;
- b. Meningkatkan akses, manfaat, partisipasi dan kontrol publik dalam pemanfaatan ruang, penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan layanan publik;
- c. Mengembangkan aktualisasi dan kearifan budaya lokal warga kota dalam tata pergaulan global;
- d. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, secara konsisten meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan;
- e. Mewujudkan masyarakat yang berdaya, kreatif dan sejahtera.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu PD yang berperan dalam pelayanan masyarakat mendukung misi penataan ruang Kota Surabaya pada poin e yaitu mewujudkan masyarakat yang berdaya, kreatif dan sejahtera. Dengan program dan kegiatan yang menunjang pemberdayaan masyarakat diantaranya pengembangan usaha ekonomi kreatif bagi perempuan, upaya pengendalian penduduk melalui program KB serta peningkatan peran kelembagaan dalam mendukung kemandirian masyarakat, sehingga dapat tercapai masyarakat yang berdaya, kreatif dan sejahtera.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam Pasal 15 ayat (1) tercantum bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Hasil analisa terhadap program-program dalam Rancangan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan berdasarkan hasil analisa isu-isu KLHS Kota Surabaya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah mendukung KLHS dalam upaya berikut:

- 1) Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam KLHS Tahun 2021-2026 indikator untuk mengukur keberhasilan Pengarusutamaan Gender dan hak anak adalah jumlah perempuan yang

bekerja, jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan, dan jumlah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terkait hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mendukung dengan penyediaan data jumlah KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Surabaya melalui pelayanan PPTP2A, Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

- 2) Optimalisasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dalam KLHS Tahun 2021-2026 keberhasilan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat diukur melalui indikator jumlah akseptor KB, jumlah cakupan peserta KB aktif, dan indeks Ibangga. Terkait hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mendukung dengan penyediaan data jumlah akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif di Kota Surabaya melalui program keluarga berencana. Selain itu, dalam mewujudkan keluarga sejahtera, program kesejahteraan keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya memiliki kegiatan dengan sasaran Kelompok Bina Balita (BKB), Kelompok Bina Remaja (BKR), dan Kelompok Bina Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya., Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang muncul berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilakukan melalui identifikasi faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan, sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Identifikasi faktor internal dan eksternal yang terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel T-B.35.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum terwujudnya pengendalian angka kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> - Akses pelayanan KB yang berkualitas masih belum merata. - Pendataan dan penyajian data masih kurang baik dan akurat, sehingga evaluasi dan perencanaan pembangunan pendudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) kurang maksimal. - Tingkat pendidikan Pasangan Usia Subur masih rendah. - Masih banyak pernikahan di bawah batas usia pernikahan (Pernikahan Usia Remaja). - Proses edukasi atau KIE masih kurang merata, khususnya di kalangan remaja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan yang mendukung pengendalian kelahiran sebagai bagian program pembangunan kependudukan, misalnya: distribusi alat kontrasepsi, tempat penyimpanan alat kontrasepsi, alat bantu/peraga untuk proses konseling edukasi dan informasi tentang Keluarga Berencana, obat-obatan untuk pereda efek pasca pelayanan KB. - Belum semua fasilitas kesehatan dan tenaga medis maupun paramedis yang dapat menggunakan teknologi informasi Keluarga Berencana, baik untuk pencatatan, pelaporan dan evaluasi maupun untuk perencanaan, terutama fasilitas yang dimiliki dan tenaga medis mandiri (non pemerintah). - Tingkat pemahaman rendah dikalangan pemuda dan pemudi yang sudah masuk Pubertas, sehingga kurang memahami tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan bahaya yang diakibatkan dari menikah di usia muda, salah satunya adalah belum matangnya organ reproduksi, atau pun masih tingginya kelahiran diluar pernikahan sebagai akibat dari seks di luar nikah. - Masih berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan seks diluar nikah akhirnya banyak remaja putra dan putri yang menikah dibawah batas yang dianjurkan BKKBN yaitu 21 - 25 tahun untuk perempuan dan 25 - 30 tahun untuk laki-laki. - Masih sedikit tenaga ahli pakar yang terlibat untuk meng edukasi tentang bahaya hubungan seks pra nikah. Sementara sudah menjadi pemikiran jamak di kalangan remaja bahwa kehamilan tidak terjadi apabila berhubungan hanya sekali padahal menurut medis hal ini

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			tidak benar.
2.	Belum optimalnya Kota Surabaya Sebagai Kota Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak - Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran - Persentase Perkawinan Anak - Bahaya Gadget Khususnya Yang Terhubung Internet Langsung - Masih Adanya Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang aktifnya peran dunia usaha, dan media massa dalam upaya pemenuhan dan perlindungan khusus anak - Belum maksimalnya capaian Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2020 sejumlah 197.486 kartu dengan persentase 26,27% dan capaian Kutipan Akta Kelahiran pada tahun 2020 sejumlah 808.484 dengan persentase 92,82% di Kota Surabaya - Masih adanya angka perkawinan anak di Kota Surabaya pada tahun 2020 sejumlah 288 anak dari 871.008 anak dengan persentase sekitar 0,033% - Kurangnya pemahaman pada anak dan keluarga terhadap dampak dari penggunaan gadget khususnya yang terhubung ke internet secara berlebihan - Kekerasan pada perempuan dan anak cenderung dilakukan oleh keluarga - Belum optimalnya peran masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan perempuan dan anak - Kurangnya sinergitas diantara instansi penegak hukum, perangkat daerah, LSM/NGO dan akademisi dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak - Kurangnya rumah aman bagi anak korban kekerasan yang pelakunya adalah keluarga
3.	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Surabaya menduduki peringkat ke-9 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab/Kota se Jawa Timur di tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, partisipasi dan mengontrol pembangunan masih ada - Kontruksi sosial masyarakat yang menganggap peran perempuan lebih rendah dari pada laki-laki
4.	Belum optimalnya strategi advokasi, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam meningkatkan pemahaman ketahanan dan kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga yang menyebabkan berkurangnya kualitas hubungan antar anggota keluarga - Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga dalam perencanaan dan penyiapan kehidupan berkeluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya akses keluarga untuk mendapatkan advokasi, promosi, komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan 8 fungsi keluarga

Faktor Internal terdiri dari:

a. Kekuatan

1. Anggaran kegiatan
2. Sarana dan Prasarana perkantoran
3. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4. Kewenangan untuk melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
5. Kewenangan untuk melaksanakan program Program Pengendalian Penduduk
6. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
7. Kewenangan untuk melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga
8. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
9. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Perempuan
10. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11. Kewenangan untuk melaksanakan Perlindungan Khusus Anak
12. SOP untuk pelaksanaan kegiatan

b. Kelemahan

1. Jumlah dan Kompetensi SDM
2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan Operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
3. Pemanfaatan data penjangkauan masyarakat

Faktor Eksternal terdiri dari:

c. Peluang

1. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah
2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat
3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya
4. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar SKPD

d. Ancaman

1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Kota Surabaya
2. Overlapping program dan kegiatan antar SKPD
3. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak

4. Kondisi pandemi yang tidak bisa diperkirakan selesainya

Berdasarkan aspek kajian hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Capaian yang telah dicapai pada target indikator Program dan Kegiatan Renstra mendekati 100%, hal ini menunjukkan bahwa antara target dan realisasi pencapaian program dan kegiatan dapat diwujudkan. Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah Jumlah dan Kompetensi SDM, Keterbatasan alokasi anggaran, fokus sasaran koordinasi yang belum optimal serta database yang masih terbatas. Terhadap aspek kajian Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-Provinsi, maka Capaian target indikator kinerja sasaran pada renstra K/L maupun Provinsi terdapat beberapa yang sinergis, tetapi belum dapat dikomparasikan selengkapnyanya sebagaimana Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Surabaya

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Tugas Pokok dan Fungsi	Peraturan Walikota Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Indikator Kinerja	SDM Aparatur, Sarana Prasarana, Pendanaan, Tupoksi, Kebijakan, Program	Nomenklatur dan Tupoksi yang Berbeda dengan K/L dan Provinsi	Ruang Lingkup pelayanan yang begitu luas karena harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) untuk K/L. Tugas pokok dan fungsi DP3AK Provinsi Jatim serta BKKBN Provinsi Jatim untuk Provinsi.

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Ketersediaan SDM	SDM sejumlah 38 orang PNS terdiri dari 10 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. 68,4% PNS berpendidikan sarjana dan pascasarjana, sedangkan 31,6% PNS berpendidikan SLTA dan Diploma	Indikator Kinerja	Penempatan SDM sesuai dengan kapasitas dan tupoksi	Banyaknya PNS yang pensiun	Perlu adanya tambahan tenaga dengan kapasitas sesuai kebutuhan OPD.
Ketersediaan Sarana Prasarana	Jumlah aset 514 buah, dalam kondisi baik dan dapat di manfaatkan.	Indikator Kinerja	Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana	Penghapusan aset yang sudah tidak dapat digunakan	Tidak ada permasalahan yang berarti tetapi perlu pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan serta penghapusan barang/aset yang sudah tidak dapat digunakan

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan PD serta permasalahan pelayanan PD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya telah diawali antara lain dengan cara melakukan analisis terhadap dinamika internasional, dinamika nasional dan dinamika regional/lokal yang terjadi, sehingga teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Selanjutnya, strategi yang berhubungan atau mempengaruhi PD dari faktor-faktor eksternal lainnya dijabarkan sebagai berikut pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	Berkembangnya teknologi informasi	Dampak media sosial terhadap tumbuh kembang anak	Dampak berkembangnya teknologi informasi terhadap kenakalan remaja	

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
2	Tujuan SDGs 1. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan	Kondisi Pandemi COVID-19	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kondisi pandemic sehingga berlarut-larut dan berpengaruh pada semua bidang	
	2. Kesenjangan Gender	Pengarusutamaan Gender	- Belum optimalnya KIE terkait Kesenjangan Gender - Masih adanya Kesenjangan dan Ketidakadilan Gender	
3	Era Globalisasi/pasar bebas	Jumlah rumah tangga/masyarakat berpenghasilan rendah yang terus bertambah	Urbanisasi yang semakin meningkat	
4	Asean Economic Community (AEC)/MEA	Harga kebutuhan pokok yang terus naik	Sebagian kelompok rumah tangga / masyarakat berpenghasilan rendah tidak mau diberdayakan	
5	Global Warming	Bencana Alam	Partisipasi dan Swadaya masyarakat terkait berbagai permasalahan	

Selain dari identifikasi faktor internal dan eksternal yang terkait tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perumusan isu-isu strategis bisa dihasilkan dari lingkungan eksternal antara lain:

1. Berkembangnya teknologi informasi
2. Tujuan SDGs : 3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 5) Kesenjangan Gender
3. Era Globalisasi/pasar bebas
4. Asean Economic Community (AEC)/MEA
5. Global Warming
6. Dampak media sosial terhadap tumbuh kembang anak
7. Pengarusutamaan Gender
8. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah yang terus bertambah
9. Harga kebutuhan pokok yang terus naik
10. Bencana Alam
11. Sebagian kelompok rumah tangga/masyarakat berpenghasilan rendah tidak mau diberdayakan
12. Mentalitas sebagian rumah tangga/masyarakat berpenghasilan rendah yang selalu mengharapkan bantuan
13. Urbanisasi yang semakin meningkat

14. Dampak berkembangnya teknologi informasi terhadap kenakalan remaja
15. Partisipasi dan Swadaya masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada dokumen Rancangan RPJMD kota Surabaya 2021-2026, bahwa Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“GOTONG ROYONG MENUJU SURABAYA KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS, DAN BERKELANJUTAN”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Gotong Royong adalah Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai element tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.

Maju adalah Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

Humanis adalah Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia, serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang menggambarkan daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi, serta melestarikan adat

istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi berikutnya dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

Kota Dunia Berkelanjutan adalah Kota Surabaya mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (Sustainability Development) yaitu bagaimana pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi V-4 dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 5 (lima) misi pembangunan kota sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta Internasional.
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan.
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial, dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut sebagaimana dijabarkan pada table berikut ini.

Tabel 3.3.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Penduduk 2. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 4. Peningkatan Kualitas Keluarga 5. Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 6. Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 7. Perlindungan Perempuan 8. Pemenuhan Hak Anak 9. Perlindungan Khusus Anak 10. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka drop out peserta KB yang masih tinggi terutama masa pandemi 2. Jumlah penduduk yang semakin bertambah karena mutasi penduduk dan kelahiran 3. Kurangnya kesadaran perempuan dan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan 4. Kesadaran masyarakat yang rendah untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak karena dianggap tabu/masalah domestik keluarga. 5. Kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana karena keterbatasan anggaran 6. Kebutuhan pengamanan dan pemeliharaan berkala pada asset perangkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah aparaturnya penyuluh KB dan pendamping yang kurang 2. Belum optimalnya sistem pelatihan berjenjang 3. Masih banyak peserta pelatihan inkubasi yang belum mandiri 4. Pemahaman masyarakat terhadap bakat minatnya pribadi masih kurang 5. Kurangnya kesadaran perempuan dan anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan 6. Kurangnya koordinasi lintas daerah dalam penyelesaian masalah perlindungan perempuan dan anak. 7. Pagu anggaran perangkat daerah 8. Usia asset yang sudah tua sehingga sering dilakukan servis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas 2. Adanya lembaga yang menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 3. Adanya fasilitasi pelatihan keterampilan masyarakat 4. Adanya fasilitas rumah kreatif bagi masyarakat 5. Adanya shelter untuk anak-anak yang mendapat permasalahan 6. Adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 7. Kesadaran karyawan dalam pemeliharaan asset perangkat daerah relative tinggi

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra

Sasaran jangka menengah Renstra K/L yang sinergi dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari beberapa Instansi yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Identifikasi permasalahan PD Kota berdasarkan Renstra K/L Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta 74 faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, dengan melihat sasaran jangka menengah renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.4.

Permasalahan Pelayanan PD Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di K/L dan Pemda.	Kurangnya pemahaman antar bidang di dalam Perangkat Daerah perihal kegiatan yang responsif gender.	Kurangnya pemahaman SDM di perangkat daerah terkait Pengarusutamaan Gender.	Adanya Perda Pengarusutamaan Gender di daerah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik.	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal, perempuan bakal calon legislatif dan keanggotaan perempuan pada organisasi sosial yang belum terdata.	Masih adanya keterbatasan akses terhadap Pendidikan, ekonomi, sosial dan politik bagi kaum perempuan.	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislative berjalan dengan baik.
		Rendahnya partisipasi perempuan di bidang ekonomi.	Rendahnya kontinuitas partisipasi perempuan di bidang ekonomi	Tingginya perhatian pemerintah untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memahami KKA (Kartu Kembang Anak)	Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KKA kurang	Adanya fasilitas pemenuhan KKA di tingkat Kecamatan
		Kurang optimalnya pemahaman masyarakat terhadap unsur-unsur penunjang tumbuh kembang anak	Keterbatasan tempat layanan peningkatan kualitas tumbuh kembang anak	Kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam mencari informasi terkait perkembangan anak
4	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak	Masih kurangnya layanan Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan yang dibutuhkan	Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan Pemenuhan Hak Anak	Tersedianya layanan yang memfasilitasi program Pemenuhan Hak Anak yang disediakan oleh Pemerintah/Swa sta
5	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurang terbukanya masyarakat dalam menyampaikan permasalahan anak	Permasalahan kekerasan pada anak dianggap tabu untuk diungkapkan.	Peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan anak cukup besar.
6	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Belum optimalnya pemahaman di masyarakat bahwa peningkatan kualitas keluarga dapat diwujudkan melalui norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang mengutamakan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Masih ada anggapan dimasyarakat bahwa kesejahteraan dilihat dari banyaknya anak	Kegiatan PD yang memiliki sasaran keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R) untuk memberi pemahaman terkait keluarga berkualitas.
			Anak laki-laki dianggap lebih mampu mengangkat derajat keluarga	
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Kurang optimalnya informasi bagi masyarakat terkait lembaga layanan pada perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	Belum optimalnya aktifitas masyarakat dalam mengakses layanan bagi korban kekerasan termasuk TPPO	Sinergitas jejaring PPTP2A dalam penanganan korban kekerasan termasuk TPPO

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8	Meningkatnya Kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Terbatasnya layanan bagi anak korban kekerasan maupun memerlukan perlindungan khusus	Minimnya tempat layanan bagi anak korban kekerasan maupun memerlukan perlindungan khusus	Kepedulian masyarakat untuk membentuk dan memfasilitasi lembaga perlindungan khusus anak
9	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA			

Adapun identifikasi permasalahan PD Kota berdasarkan Renstra K/L Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, dengan melihat sasaran jangka menengah Renstra Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan PD Kota berdasarkan Sasaran Renstra Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya angka kelahiran total	Menurunnya angka kelahiran, pengaturan jarak kelahiran ideal 2-4 tahun meningkat	Perilaku 4T (terlalu rapat, banyak, muda, tua) masih melekat di sebagian masyarakat	Pilihan alat kontrasepsi modern sudah tersedia
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	kesadaran menggunakan alkon MKJP (IUD, Implant, MOW, MOP) masih rendah karena kurangnya pengetahuan serta masih tinggi kepercayaan terhadap suntik dan pil yang dianggap lebih praktis dan mudah tapi beresiko putus pemakaian atau Drop Out (DO)	Mayoritas peserta KB masih menggunakan kontrasepsi jangka pendek	Ketersediaan MKJP yang memadai di setiap fasilitas kesehatan
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pengetahuan tentang KB. - Adanya budaya dan kepercayaan bahwa 	Kurangnya minat generasi muda untuk mengetahui	- Sarana KIE tersedia baik manual atau digital.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		membatasi kelahiran tidak sesuai norma agama. - Rendahnya dorongan suami untuk mengizinkan istrinya ber-KB. - Adanya keinginan menunda memiliki anak tapi tidak dilindungi dengan alat kontrasepsi.	tentang Kesehatan Reproduksi sehingga Pengetahuan dalam pemilihan alkon masih kurang.	- Tersedianya petugas lapangan atau Kader KB.
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	Masih tingginya seks pranikah di kalangan remaja	Melemahnya penerapan 8 fungsi keluarga serta pengaruh media sosial.	Program generasi berencana menjadi prioritas nasional
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	- Kurangnya kesadaran anggota keluarga dalam penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga; - Meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak dini serta terlaksananya 4 (empat) pendekatan ketahanan keluarga.	Masih terbatasnya pengetahuan remaja dan anak muda di Indonesia mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas mengakibatkan masih ada pernikahan anak	Kebijakan pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengarusutamakan pembangunan keluarga sebagai Program Prioritas Pembangunan Nasional
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Masih tingginya budaya dan anggapan di kalangan masyarakat bahwa ketika sudah baligh sebaiknya langsung menikah sehingga diharapkan mengurangi beban keluarga.	Pemahaman tentang generasi berencana serta kesehatan reproduksi bagi remaja masih kurang	Program generasi berencana marak serta mulai meningkat

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya yang digunakan untuk mengidentifikasi Permasalahan Pelayanan PD Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya, dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.6.

Permasalahan Pelayanan PD Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Komitmen Pembangunan Responsif Gender	PUG belum menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Kecamatan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari pemerintah, masyarakat, swasta, maupun sektor lain	Adanya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
2	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan perempuan	Belum semua perempuan mampu berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama dalam pembangunan terutama di bidang politik, ekonomi dan publik	Rendahnya kesadaran perempuan untuk mengerti pentingnya aspirasi perempuan dalam pembangunan	Adanya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3	Meningkatnya perlindungan anak	Belum optimalnya sinergitas jejaring PPTP2A	Belum optimalnya peran masyarakat dalam melakukan perlindungan anak	Adanya kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait perlindungan anak
4	Meningkatnya pengendalian penduduk	Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu: fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), in-migration (migrasi masuk), out-migration (migrasi keluar).	<ul style="list-style-type: none"> - Akses keluarga terhadap pelayanan KB yang berkualitas belum merata - Masih ada budaya menikah di usia muda - Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi masih rendah - Pengetahuan tentang alkon 	Komitmen pemerintah Kota Surabaya yang tinggi terhadap pengendalian penduduk

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			KB masih kurang - Penggunaan alkon KB MKJP masih rendah	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil analisa terhadap program-program dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2026 merupakan rekomendasi berdasarkan hasil analisa isu-isu RTRW Tahun 2014-2034 dan KLHS Tahun 2021-2026 Kota Surabaya. Untuk program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang masuk dalam analisa Rencana Tata Ruang dan Wilayah adalah yang berkaitan dengan program Keluarga Berencana, sedangkan yang masuk dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Permasalahan pelayanan PD berdasarkan analisa RTRW dan KLHS dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.7.

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Analisis RTRW dan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Analisis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	RTRW Tahun 2014-2034 : Mengembangkan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan	Jumlah faskes pelayanan KB Mantap (MOW dan MOP) tidak merata di wilayah Kota Surabaya, hanya ada di Surabaya Barat dan Surabaya Pusat.	Mobilisasi (Jemput-antar) calon akseptor KB Mantap kurang optimal karena faskes pelayanan KB hanya ada di Surabaya Pusat dan Barat	Permintaan Masyarakat untuk mengikuti KB Mantap cukup banyak
2	KLHS 2021-2026 : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum ada data terkait proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan	Dominannya budaya patriarki dimasyarakat yang menganggap perempuan tidak	Adanya kegiatan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di

No	Hasil Analisis terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi	perlu dilibatkan dalam segala proses pengambilan keputusan	bidang kesehatan, politik, hukum, sosial dan ekonomi
3	KLHS 2021-2026 : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu: fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), in-migration (migrasi masuk), out-migration (migrasi keluar).	Akses keluarga terhadap pelayanan KB yang berkualitas belum merata karena masih ada budaya menikah di usia muda, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi masih rendah, pengetahuan tentang alkon KB masih kurang, penggunaan alkon KB MKJP masih rendah	Komitmen pemerintah Kota Surabaya yang tinggi terhadap pengendalian penduduk

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, isu-isu strategis yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, hal ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan permasalahan perempuan dan anak antara lain

trafficking, permasalahan remaja lainnya yang salah satunya dipicu oleh dampak pandemi Covid-19.

2. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
3. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (*unmet need*).
3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
4. Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja / beraktivitas di Kota Surabaya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

4.1.1 Perumusan Tujuan

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.

4.1.2 Perumusan Sasaran

Adapun sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Mewujudkan keluarga yang berkualitas
2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan
5. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut.

Tabel T-C. 25.
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Bangga Kencana	65.05 %	66.96 %	68.87 %	70.78 %	72.69 %
1.1	Mewujudkan keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	54.38 %	56.29 %	58.20 %	59.33 %	60.12 %
1.2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	1.78 %	1.76 %	1.74 %	1.73 %	1.72 %
		Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita	26	25	25	24	24
2	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,73	93,74	93,75	93,77	93,78

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026
2.1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84.015	84.24	84.465	84.69	84.915
2.2	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	83.16 %	83.46 %	83.76 %	84.06 %	84.36 %
2.3	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	81,79%	82,91%	83,96%	84,95%	85,88%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel T-C.26 sebagai berikut.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan			
MISI II : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Mewujudkan keluarga yang berkualitas	Peningkatan pengetahuan dan skill pengasuhan keluarga	Mendorong keluarga untuk meningkatkan pemahaman fungsi keluarga secara optimal
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesertaan peserta KB terutama MKJP - Menurunkan angka Drop Out KB - Menekan Unmeet need - Menekan angka pernikahan dibawah 19 tahun - Melakukan sosialisasi dan bimbingan Kespro pada remaja - Meningkatkan pelayanan pada masyarakat di Faskes serta melalui Bakti Sosial Kesehatan dan KB 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan - Mendorong peningkatan KB Baru dan KB Aktif serta menekan angka Drop Out KB dan Unmet Need
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kapasitas SDM melalui peningkatan sarana dan prasarana serta ketertiban administrasi perkantoran untuk mendukung keberhasilan program.	Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jejaring PUG	Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap 7 prasyarat PUG di Perangkat Daerah
	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Peningkatan upaya pemenuhan hak anak dengan melibatkan stakeholder 2. Peningkatan upaya perlindungan khusus perempuan dan anak melalui optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Strategi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program RPJMD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka strategi yang dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan pengetahuan dan skill pengasuhan keluarga.
2. Meningkatnya kesertaan peserta KB terutama MKJP, menurunkan angka Drop Out KB, menekan Unmet need, menekan angka pernikahan dibawah 19 tahun dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan Kespro pada remaja, meningkatkan pelayanan pada masyarakat di Faskes serta melalui Bakti Sosial Kesehatan dan KB.
3. Peningkatan Kapasitas SDM melalui peningkatan sarana dan prasarana serta ketertiban administrasi perkantoran untuk mendukung keberhasilan program.
4. Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jejaring PUG.

5. Peningkatan upaya pemenuhan hak anak dengan melibatkan stakeholder.
6. Peningkatan upaya perlindungan khusus perempuan dan anak melalui optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun Renstra 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Mendorong keluarga untuk meningkatkan pemahaman fungsi keluarga secara optimal.
2. Mendorong peningkatan KB Baru dan KB Aktif serta menekan angka Drop Out KB dan Unmet Need.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap 7 prasyarat PUG di Perangkat Daerah.
5. Meningkatkan upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan anak.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.1 Tujuan dan Sasaran PD

Berdasarkan Visi Misi Kota Surabaya Tahun 2021-2026 yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026, dan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2021, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada kerangka perencanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, dengan sasaran :
 - a. Mewujudkan keluarga yang berkualitas
 - b. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak, dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - b. Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - c. Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

1.2 Tujuan Strategis PD

Perumusan tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya didapatkan dengan cara mensinkronkan tujuan strategis pembangunan kota yang sesuai dengan pelayanan PD dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan. Tujuan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak karena adanya kewenangan untuk melaksanakan program pemberdayaan, pembinaan kepada keluarga serta pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga;
2. Meningkatnya kualitas layanan KB dasar karena adanya kewenangan untuk melaksanakan program Bangga Kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) sehingga terwujud keluarga yang berkualitas.

1.3 Sasaran Strategi PD

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dicapai melalui sasaran strategis PD, masing-masing tujuan memiliki satu atau beberapa sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis PD, sasaran strategis dari masing-masing tujuan dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak, memiliki sasaran strategi :
 - a. Meningkatkan akses partisipasi kontrol, dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan
 - b. Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking
2. Tujuan : Meningkatnya kualitas layanan KB dasar, memiliki sasaran strategi : Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menyusun Program dan Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan :
 - a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan kegiatan :
 - a. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan :
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, dengan kegiatan :
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 7. Program Perlindungan Perempuan, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) , dengan kegiatan :
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 10. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun 2021-2026 beserta alokasi pendanaan pada tabel T-C.27.

Tabel T-C.27.

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya**

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			Indeks Bangga Kencana	61.23 %	65.05 % Rp 12.323.256.881	66.96 % Rp 13.032.866.073	68.87 % Rp 13.752.716.965	70.78 % Rp 14.510.044.829	72.69 % Rp 15.187.323.413	72.69 % Rp 15.187.323.413							DP3AP 2KB	
Mewujudkan keluarga yang berkualitas			Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	52.47 %	54.38 % Rp 3.350.553.306	56.29 % Rp 3.703.496.918	58.20 % Rp 4.055.328.602	59.33 % Rp 4.417.688.689	60.12 % Rp 4.687.035.189	60.12 % Rp 4.687.035.189							DP3AP 2KB	
	21404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	N/A tahun	20 tahun Rp 3.350.553.306	20 tahun Rp 3.703.496.918	21 tahun Rp 4.055.328.602	21 tahun Rp 4.417.688.689	21 tahun Rp 4.687.035.189	21 tahun Rp 4.687.035.189							DP3AP 2KB	
			Persentase balita yang mengikuti PAUD	N/A %	41.53 %	41.55 %	41.56 %	41.57 %	41.58 %	41.58 %							DP3AP 2KB	
			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	N/A %	39.24 %	43.37 %	47.50 %	51.63 %	55.76 %	55.76 %							DP3AP 2KB	
			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatann	N/A %	40%	41%	42%	43%	44%	44%							DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			ya															
	21404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia	0 laporan	1 laporan Rp 3.350.553.306	1 laporan	Rp 3.703.496.918	1 laporan	Rp 4.055.328.602	1 laporan	Rp 4.417.688.689	1 laporan	Rp 4.687.035.189	1 laporan	Rp 4.687.035.189		DP3AP 2KB	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Remaja	0 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		DP3AP 2KB		
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	0 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		DP3AP 2KB		

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Balita	0 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		DP3AP 2KB	
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk			Angka Kelahiran Total (TFR)	1.79 %	1.78 %	Rp 8.972.703.575	1.76 %	Rp 9.329.369.155	1.74 %	Rp 9.697.388.363	1.73 %	Rp 10.092.356.140	1.72 %	Rp 10.500.288.224	1.72 %	Rp 10.500.288.224	DP3AP 2KB	
			Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita	26	26		25		25		24		24		24		DP3AP 2KB	
	21402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan	N/A %	30.15 %	Rp 344.103.006	46.07 %	Rp 355.828.037	63.06 %	Rp 363.015.151	81.10 %	Rp 380.744.476	100%	Rp 393.980.970	100%	Rp 393.980.970	DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	214.02.001	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK	0 Sekolah	70 Sekolah	Rp 209.152.066	75 Sekolah	Rp 214.497.988	80 Sekolah	Rp 220.005.103	85 Sekolah	Rp 225.665.357	89 Sekolah	Rp 231.496.961	89 Sekolah	Rp 231.496.961	DP3AP 2KB	
	214.02.002	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	0 Perangkat Daerah	72 Perangkat Daerah	Rp 134.950.940	72 Perangkat Daerah	Rp 141.330.049	72 Perangkat Daerah	Rp 143.010.048	72 Perangkat Daerah	Rp 155.079.119	72 Perangkat Daerah	Rp 162.484.009	72 Perangkat Daerah	Rp 162.484.009	DP3AP 2KB	
	214.003	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.73 %	18.55 %	Rp 8.628.600.569	18.35 %	Rp 8.973.541.118	18.10 %	Rp 9.334.373.212	17.85 %	Rp 9.711.611.664	17.60 %	Rp 10.106.307.254	17.60 %	Rp 10.106.307.254	DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	81%	82%		83%		84%		85%		86%		86%		DP3AP 2KB	
	214030202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama kader IMP	12 Kali	12 Kali	Rp 2.655.425.387	12 Kali	Rp 2.740.328.652	12 Kali	Rp 2.828.590.651	12 Kali	Rp 2.920.184.540	12 Kali	Rp 3.015.408.379	12 Kali	Rp 3.015.408.379	DP3AP 2KB	
	214030203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	414120 Orang	416911 Orang	Rp 3.744.454.382	416957 Orang	Rp 3.924.406.346	417003 Orang	Rp 4.113.450.401	417050 Orang	Rp 4.312.056.664	417096 Orang	Rp 4.520.722.143	417096 Orang	Rp 4.520.722.143	DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	4 Laporan	4 Laporan Rp 2.228.720.800	4 Laporan Rp 2.308.806.120	4 Laporan Rp 2.392.332.160	4 Laporan Rp 2.479.370.460	4 Laporan Rp 2.570.176.732	4 Laporan Rp 2.570.176.732	4 Laporan Rp 2.570.176.732	4 Laporan Rp 2.570.176.732	4 Laporan Rp 2.570.176.732	4 Laporan Rp 2.570.176.732	4 Laporan Rp 2.570.176.732	DP3AP 2KB		
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak			Indeks Pembangunan Gender	93,58	93,73 Rp 22.232.044.394	93,74 Rp 24.660.108.499	93,75 Rp 25.100.646.821	93,77 Rp 26.526.002.620	93,78 Rp 27.358.991.595	93,78 Rp 27.358.991.595	93,78 Rp 27.358.991.595	93,78 Rp 27.358.991.595	93,78 Rp 27.358.991.595	93,78 Rp 27.358.991.595	93,78 Rp 27.358.991.595	DP3AP 2KB		

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	83.79	84.015	Rp 15.533.758.760	84.24	Rp 16.001.275.371	84.465	Rp 16.351.861.097	84.69	Rp 17.123.805.319	84.915	Rp 17.557.497.186	84.915	Rp 17.557.497.186	DP3AP 2KB	
	208001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariat an	100%	100%	Rp 15.533.758.760	100%	Rp 16.001.275.371	100%	Rp 16.351.861.097	100%	Rp 17.123.805.319	100%	Rp 17.557.497.186	100%	Rp 17.557.497.186	DP3AP 2KB	
	208001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	Rp 11.749.118.462	100%	Rp 12.042.846.424	100%	Rp 12.343.917.584	100%	Rp 12.652.515.524	100%	Rp 12.968.828.412	100%	Rp 12.968.828.412	DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	02																	
	20801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	Rp 3.299.770.666	100%	Rp 3.458.608.469	100%	Rp 3.447.701.601	100%	Rp 3.902.865.450	100%	Rp 4.012.046.279	100%	Rp 4.012.046.279	DP3AP 2KB	
	20801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp 484.869.632	100%	Rp 499.820.478	100%	Rp 560.241.912	100%	Rp 568.424.345	100%	Rp 576.622.495	100%	Rp 576.622.495	DP3AP 2KB	
Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			Indeks Pemberdayaan Gender	82.86 %	83.16 %	Rp 2.294.119.925	83.46 %	Rp 2.492.168.083	83.76 %	Rp 2.548.400.323	84.06 %	Rp 2.688.013.490	84.36 %	Rp 2.792.894.467	84.36 %	Rp 2.792.894.467	DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	208002	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	5.26 %	100%	Rp 1.984.462.048	100%	Rp 2.077.357.847	100%	Rp 2.127.600.606	100%	Rp 2.238.330.002	100%	Rp 2.324.452.411	100%	Rp 2.324.452.411	DP3AP 2KB	
			Perangkat Daerah yang responsif gender	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		DP3AP 2KB	
	20802201	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 674.784.028	3 Dokumen	Rp 699.864.624	3 Dokumen	Rp 709.549.895	3 Dokumen	Rp 753.478.983	3 Dokumen	Rp 782.126.026	3 Dokumen	Rp 782.126.026	DP3AP 2KB	
	208020202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	0 Orang	600 Orang	Rp 381.778.215	600 Orang	Rp 415.342.574	600 Orang	Rp 420.088.874	600 Orang	Rp 449.463.917	600 Orang	Rp 467.797.353	600 Orang	Rp 467.797.353	DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Kewenangan Kabupaten/Kota															
	208020203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kegiatan	21 Kegiatan Rp 927.899.805	21 Kegiatan	Rp 962.150.649	21 Kegiatan	Rp 997.961.837	21 Kegiatan	Rp 1.035.387.102	21 Kegiatan	Rp 1.074.529.032	21 Kegiatan	Rp 1.074.529.032		DP3AP 2KB	
	20805	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	N/A %	100% Rp 309.657.877	100%	Rp 414.810.236	100%	Rp 420.799.717	100%	Rp 449.683.488	100%	Rp 468.442.056	100%	Rp 468.442.056		DP3AP 2KB	
	20805201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	0 Lembaga	72 Lembaga Rp 309.657.877	72 Lembaga	Rp 414.810.236	72 Lembaga	Rp 420.799.717	72 Lembaga	Rp 449.683.488	72 Lembaga	Rp 468.442.056	72 Lembaga	Rp 468.442.056		DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak			Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	79,31%	81,79%	Rp 4.404.165.709	82,91%	Rp 6.166.665.045	83,96%	Rp 6.200.385.401	84,95%	Rp 6.714.183.811	85,88 %	Rp 7.008.599.942	85,88 %	Rp 7.008.599.942	DP3AP 2KB	
	20803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	100%	Rp 365.185.200	100%	Rp 647.832.643	100%	Rp 665.912.329	100%	Rp 684.623.414	100%	Rp 704.008.706	100%	Rp 704.008.706	DP3AP 2KB	
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	16.13 %	32.25 %		48.38 %		64.51 %		80.64 %		100%		100%		DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	20803202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	17 kasus	20 kasus	Rp 240.222.993	20 kasus	Rp 247.378.917	20 kasus	Rp 254.823.745	20 kasus	Rp 262.567.063	20 kasus	Rp 270.626.490	20 kasus	Rp 270.626.490	DP3AP 2KB	
	20803203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	5 kecamatan	10 kecamatan	Rp 124.962.207	15 kecamatan	Rp 400.453.726	20 kecamatan	Rp 411.088.584	25 kecamatan	Rp 422.056.351	31 kecamatan	Rp 433.382.216	31 kecamatan	Rp 433.382.216	DP3AP 2KB	
	208034	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	174	209	Rp 490.811.642	245	Rp 533.887.988	246	Rp 520.589.869	282	Rp 589.528.007	283	Rp 619.665.009	283	Rp 619.665.009	DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	20804203	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	1 laporan	12 laporan	Rp 490.811.642	12 laporan	Rp 533.887.988	12 laporan	Rp 520.589.869	12 laporan	Rp 589.528.007	12 laporan	Rp 619.665.009	12 laporan	Rp 619.665.009	DP3AP 2KB	
	20806	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	34.41 %	47.4 %	Rp 2.355.917.596	60.38 %	Rp 3.418.814.239	79.87 %	Rp 3.465.327.764	92.85 %	Rp 3.743.914.966	100%	Rp 3.918.987.218	100%	Rp 3.918.987.218	DP3AP 2KB	
	20806201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 550.461.140	1 kegiatan	Rp 798.364.992	1 kegiatan	Rp 834.253.991	1 kegiatan	Rp 871.931.044	1 kegiatan	Rp 911.496.624	1 kegiatan	Rp 911.496.624	DP3AP 2KB	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab	Lokasi		
					2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	20806202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	3 kegiatan Rp 1.805.456.456	3 kegiatan Rp 2.620.449.247	3 kegiatan Rp 2.631.073.773	3 kegiatan Rp 2.871.983.922	3 kegiatan Rp 3.007.490.594	3 kegiatan Rp 3.007.490.594						DP3AP 2KB		
	20807	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	100% Rp 1.192.251.271	100% Rp 1.566.130.175	100% Rp 1.548.555.439	100% Rp 1.696.117.424	100% Rp 1.765.939.009	100% Rp 1.765.939.009						DP3AP 2KB		
			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	16.13 %	32.25 %	48.38 %	64.51 %	80.64 %	100%	100%						DP3AP 2KB		

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											PD Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	20807202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	5 lembaga	10 lembaga Rp 1.192.251.271	15 lembaga Rp 1.566.130.175	20 lembaga Rp 1.548.555.439	25 lembaga Rp 1.696.117.424	31 lembaga Rp 1.765.939.009	31 lembaga Rp 1.765.939.009					DP3AP 2KB			
			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	99 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	150 kasus	DP3AP 2KB			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai, atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu misi dalam RPJMD 2021 - 2026 Kota Surabaya adalah Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif, serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Indikator tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, dengan indikator Indeks Bangga Kencana
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender

Dari beberapa indikator kinerja tujuan, juga dirumuskan beberapa indikator sasaran sebagai berikut:

1. Mewujudkan keluarga yang berkualitas, dengan indikator Indeks pembangunan keluarga (ibangga).
2. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, dengan indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dan Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15-19 (ASFR/Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita.
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator Nilai SAKIP.
4. Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender.
5. Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan indikator Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.

Tabel T-C.28 di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2021-2026.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tujuan	61.23 %	65.05 %	66.96 %	68.87 %	70.78 %	72.69 %	72.69 %
	Indeks Bangga Kencana							
2	Tujuan	93,58	93,73	93,74	93,75	93,77	93,78	93,78
	Indeks Pembangunan Gender							
3	Sasaran	1.79 %	1.78 %	1.76 %	1.74 %	1.73 %	1.72 %	1.72 %
	Angka Kelahiran Total (TFR)							
4	Sasaran	52.47 %	54.38 %	56.29 %	58.20 %	59.33 %	60.12 %	60.12 %
	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)							
5	Sasaran	82.86 %	83.16 %	83.46 %	83.76 %	84.06 %	84.36 %	84.36 %
	Indeks Pemberdayaan Gender							
6	Sasaran	83.79	84.015	84.24	84.465	84.69	84.915	84.915
	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
7	Sasaran	79,31%	81,79%	82,91%	83,96%	84,95%	85,88%	85,88%
	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum							
8	Sasaran	26	26	25	25	24	24	24
	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita							

BAB VIII

PENUTUP

Pelaksanaan rencana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya ditentukan dan tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan terhadap eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya ini merupakan suatu dokumen yang menjadi acuan dan pedoman dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya selama 5 tahun.

Surabaya, 17 September 2021

Pt. KEPALA DINAS,



[Handwritten Signature]
ANTIEK SUGHARTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196709101996022001